

Bissu Bugis dan Islamisasi Sulawesi Selatan: Negosiasi Identitas Gender dalam Sejarah Peradaban Islam Nusantara

Natasha Adiratna

UIN Sunan Ampel Surabaya
natashaadiratna4@gmail.com

Abd A'la

UIN Sunan Ampel Surabaya
abdalabs@uinsa.ac.id

Rochimah

UIN Sunan Ampel Surabaya
rochimah@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas peran dan kedudukan Bissu dalam masyarakat Bugis pra-Islam serta dinamika yang terjadi setelah proses Islamisasi di Sulawesi Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh Islamisasi terhadap perubahan peran sosial-religius Bissu, bentuk negosiasi identitas gender dalam dominasi nilai Islam, serta strategi keberlanjutan tradisi di tengah modernisasi dan penguatan norma keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak Islamisasi terhadap posisi sosial Bissu, menganalisis bentuk-bentuk negosiasi identitas gender yang mereka lakukan, serta menjelaskan kontribusi fenomena ini terhadap pemahaman Islam Nusantara sebagai hasil akulturasi agama dan budaya. Meski menghadapi marginalisasi, komunitas Bissu tetap bertahan melalui strategi negosiasi identitas, adaptasi simbolik, serta keterlibatan dalam bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan studi pustaka, bertujuan mengungkap dampak Islamisasi terhadap posisi sosial Bissu, bentuk-bentuk negosiasi identitas gender yang mereka lakukan, serta kontribusinya bagi pemahaman Islam Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena Bissu memperlihatkan adanya proses akulturasi agama dan tradisi, di mana Islam tidak sepenuhnya menghapus budaya lokal, melainkan mengintegrasikannya sehingga lahir corak Islam yang khas, berakar pada tradisi Bugis namun tetap berlandaskan tauhid.

Kata Kunci: *bissu, bugis, gender, islam*

PENDAHULUAN

Islamisasi di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga ke-17 berlangsung melalui jalur perdagangan dan dakwah ulama yang datang dari wilayah Melayu dan Minangkabau. Awalnya, Islam diperkenalkan melalui interaksi para pedagang, lalu diperkuat oleh peran ulama yang berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan

menyesuaikan dakwah pada adat *pangngadereng* yang berarti konsep dasar dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat Bugis yang berfungsi sebagai pedoman hidup.(M. Dahlan M, 2021) Penerimaan Islam semakin kuat setelah Kerajaan Gowa-Tallo menetakannya sebagai agama resmi antara tahun 1605–1611, yang kemudian mendorong penyebaran cepat ke berbagai kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Meski demikian, penyebaran ini tidak selalu berjalan damai. Bukti arkeologis berupa makam, masjid, dan artefak Islam dari awal abad ke-17 juga menegaskan posisi Islam sebagai agama yang diakui secara resmi. Proses ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan bukan hanya fenomena keagamaan, tetapi juga melibatkan faktor politik, budaya, dan sosial yang saling berkaitan.

Keterkaitan tersebut tampak jelas dalam masyarakat Bugis, salah satu etnis terbesar di Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki tradisi adat dan struktur sosial yang kuat. Tradisi khas mereka, seperti *Appabottingeng* (*pesta perkawinan*) sarat simbolisme menjadi gambaran betapa nilai budaya berperan penting dalam menjaga solidaritas keluarga, stratifikasi sosial, dan harmoni komunitas.(Fatimah et al., 2024) Melalui tradisi-tradisi tersebut, masyarakat Bugis menunjukkan identitas yang kuat, dengan akar budaya yang kuat serta berperan penting dalam dinamika sejarah dan struktur sosial Sulawesi Selatan.

Masyarakat Bugis juga mengenal kehadiran Bissu sebagai figur sakral yang menempati posisi istimewa. Bissu dalam kebudayaan Bugis berfungsi sebagai pemangku adat, pemimpin ritual keagamaan, sekaligus penjaga nilai spiritual dan kosmologis masyarakat. Dalam sistem kepercayaan pra-Islam, mereka diyakini mampu menjembatani hubungan antara manusia dengan dunia gaib, sehingga berperan sebagai penghubung antara manusia, leluhur, dan kekuatan ilahi dalam kosmologi Bugis. (Azizah, 2022) *Botting Langik* (Dunia Atas), *Kale Lino* (Dunia Tengah), dan *Paratiki* (Dunia Bawah) Mereka memimpin upacara penting seperti *Mappalili* (ritual menyambut musim tanam) dan *Maggiri* (tarian seremonial puncak) yang bertujuan untuk memohon restu dewata serta menjaga keseimbangan alam. Lebih jauh lagi, Bissu juga dianggap sebagai penjaga tradisi klasik pemerintahan Bugis, sehingga keberadaannya menjadi simbol budaya yang menjiwai struktur sosial sekaligus ritual kerajaan sejak masa lampau.(Said, 2017)

Masuknya Islam ke ranah budaya Bugis memicu ketegangan dan negosiasi mendalam, terutama karena sistem kepercayaan yang mengakui gender non-biner seperti Bissu, figur sakral dan terpaut dengan simbol spiritual pra-Islam berbeda secara normatif dari pandangan gender dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurul Azizah, “setelah Islam masuk, posisi Bissu tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kepercayaan, tetapi bergeser menjadi sekadar budaya” melalui proses asimilasi yang membuat mereka tetap bertahan dengan mengenakan simbol-simbol Islam dan memperjelas kategori gender untuk menyesuaikan diri dengan nilai Islam yang diterima masyarakat. (Azizah, 2022)

Studi lain menggarisbawahi bahwa posisi Bissu yang dulunya sebagai pemimpin ritual tradisional tergeser oleh nilai-nilai islam, sehingga peran adatnya di kalangan masyarakat Bugis makin kurang dihargai, proses ini menunjukkan betapa islamisasi tidak

hanya soal perpindahan kepercayaan, tetapi juga menyentuh tataran identitas gender dan struktur spiritual masyarakat, menuntut penyesuaian simbolik dan sosial dalam konflik dan negosiasi budaya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keberadaan Bissu dalam masyarakat Bugis dan kaitannya dengan Islamisasi di Sulawesi Selatan. Suliyati (2018) melalui artikelnya di *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* menekankan keistimewaan gender Bissu yang tidak termasuk dalam kategori laki-laki maupun perempuan. Ia menjelaskan peran penting Bissu sebagai pemangku adat dan perantara spiritual, sekaligus bagaimana eksistensinya semakin berkurang akibat perubahan politik dan penolakan dari kelompok Islam tertentu. (Suliyati, 2018)

Penelitian oleh Muh. Said (2016) dalam prosiding Seminar Nasional yang diterbitkan Universitas Negeri Makassar menganalisis peran Bissu pada masa kerajaan hingga pasca masuknya Islam. Ia menemukan bahwa Bissu berperan sentral dalam upacara kerajaan pra-Islam, namun perannya perlahan digantikan oleh *puang kali* (kadhi) setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan. (Said, 2017)

Sementara itu, Rokhmansyah, Hanum, dan Dahlan (2018) dalam *CaLLs: Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics* mengkaji representasi gender Calabai dan Bissu dalam novel *Calabai* karya Pepi Al-Bayqunie. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Calabai sering dipandang menyimpang dari norma sosial, keberadaan Bissu tetap dihormati karena perannya yang penting dalam tradisi Bugis. (Rokhmansyah et al., 2018)

Penelitian terbaru dilakukan oleh Azizah (2022) dalam *Jurnal Penelitian Keislaman* yang menyoroti pergumulan Bissu dalam menghadapi dominasi Islam. Ia menemukan bahwa setelah abad ke-16, posisi Bissu mengalami pergeseran dari institusi kepercayaan menuju bagian dari kebudayaan. Untuk mempertahankan eksistensinya, Bissu mengadopsi simbol-simbol keislaman dan melakukan asimilasi dengan nilai-nilai baru. (Azizah, 2022)

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana proses Islamisasi di Sulawesi Selatan memengaruhi peran sosial Bissu, bagaimana bentuk negosiasi identitas gender yang mereka jalankan dan sejauh mana strategi Bissu dalam mempertahankan eksistensinya, serta apa makna fenomena ini bagi pemahaman sejarah peradaban Islam Nusantara. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak Islamisasi terhadap posisi Bissu, menganalisis strategi negosiasi identitas gender yang mereka lakukan, menjelaskan upaya Bissu dalam menjaga keberlanjutan perannya dalam tradisi Bugis, serta mengungkap kontribusi fenomena ini bagi wacana sejarah peradaban Islam yang menekankan interaksi antara agama, budaya, dan identitas gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan studi kepustakaan. Pendekatan historis dipilih untuk menelusuri dinamika Islamisasi di Sulawesi Selatan serta perubahan peran Bissu dalam konteks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Islamisasi Terhadap Peran Sosial Bissu

Sejak masa pra-Islam, masyarakat Bugis telah mengenal lima kategori gender, yaitu *burane* (laki-laki), *makkunrai* (perempuan), *calabai* (laki-laki yang mengekspresikan diri seperti perempuan), *calalai* (perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki), dan *bissu* (sosok yang tidak termasuk laki-laki maupun perempuan). Dari kelima kategori tersebut, *bissu* menempati posisi paling penting dalam struktur kerajaan pra-Islam. Istilah *bissu* sendiri diyakini berasal dari kata *bessi* dalam bahasa Bugis yang berarti “bersih” atau “suci,” dan penyebutan ini juga ditemukan dalam epos Bugis *La Galigo*. Sebagai figur sakral, *bissu* dipandang sebagai perantara antara manusia dengan dewa-dewa leluhur. (Azizah, 2022)



Gambar 1: Bissu besiap melakukan penyambutan adat upacara adat pernikahan (Sumber: Kompas.com, 2022)

Pada masa lampau, masyarakat Sulawesi Selatan menganut beragam kepercayaan. Khususnya pada etnis Bugis, Makassar, dan Mandar, telah berkembang pemahaman mengenai konsep ketunggalan Tuhan yang mereka sebut sebagai “*Dewata SeuwaE*”, yang berarti Tuhan Yang Esa. Istilah *Dewata* berasal dari gabungan kata *De’* dan *Watang* yang diartikan sebagai “tidak ada yang dapat menandingi kekuatannya”. Ada pula tafsiran lain yang menyebut *De’* dan *Watang* sebagai “tidak memiliki jasmani”. Tidak menutup kemungkinan pula istilah tersebut merupakan adopsi dari kebudayaan lain. Namun, terlepas dari beragam pendapat tersebut, secara umum masyarakat Sulawesi Selatan sejak dahulu sudah mempercayai adanya Tuhan yang tunggal. (Said, 2017)

Dalam tatanan sosial Bugis pra-Islam, Bissu dipandang sebagai sosok sakral yang menjalankan peran penting sebagai pemimpin ritual, pelindung adat (*pangngadereng*), sekaligus perantara spiritual antara manusia, penguasa, dan dunia ilahi. Mereka dihormati sebagai penjaga benda pusaka kerajaan (*arajang*) serta dipercaya memimpin berbagai upacara penghubung (*atoran*) yang mengikat manusia dengan kekuatan kosmik. Sebagai bagian dari *pangngadereng*, Bissu memperoleh legitimasi sosial dan religius untuk menyelenggarakan upacara adat, seperti prosesi penobatan, pernikahan, hingga ritual panen, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara dunia manusia, leluhur, dan kekuatan transendental. Dengan kedudukan tersebut, Bissu dipertegas fungsinya sebagai mediator spiritual, diyakini mampu berinteraksi dengan dimensi gaib melalui bahasa

ritual, serta berperan menjaga keteraturan kosmos dalam kehidupan masyarakat Bugis pra-Islam.(Jufri et al., 2023)

Kehadiran Islam di Sulawesi Selatan membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Peralihan orang Bugis dan etnis lain di kawasan tersebut menjadi penganut Islam menyebabkan posisi Bissu kehilangan legitimasi dan dukungan. Peran mereka dalam aspek spiritual dan keagamaan digantikan oleh para ulama yang memperoleh otoritas baru. Seiring dengan itu, Bissu tidak lagi menempati pusat kekuasaan, melainkan terpinggirkan hingga bertahan di wilayah pedalaman. Sejak abad ke-17, masuknya Islam tidak hanya memengaruhi kehidupan religius masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan dan tatanan sosial budaya di kawasan ini. Bissu' yang dulunya memegang peranan penting perlahan tergeser karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Golongan Islam fundamentalis, menganggap kegiatan bissu sudah menyalahi ajaran agama Islam. Mereka dianggap menduakan Tuhan (musyrik). Selanjutnya dalam perjalanan sejarah Bissu ditandai oleh munculnya gerakan DI/TII, yang menilai praktik keagamaan Bissu sebagai bentuk kemusyrikan dan takhayul. Kelompok ini kemudian melancarkan serangan terhadap komunitas Bissu dengan membakar perlengkapan ritual mereka, bahkan melakukan pembunuhan terhadap Bissu yang dianggap menolak bertaubat. Periode ini dipandang sebagai masa kelam dalam sejarah keberadaan Bissu. Di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar, gerakan DI/TII merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal tanpa pandang bulu, termasuk komunitas Bissu.

Pada masa Orde Baru tahun 1965, digulirkan sebuah gerakan pemurnian ajaran Islam yang dikenal dengan nama *Operasi Toba* (Operasi Taubat). Aksi ini berupa pembantaian massal yang menyasar kaum Bissu serta masyarakat yang masih mempercayai kesaktian *arajang*. Mereka seringkali dituduh sebagai simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Bissu dipandang tidak beragama, melakukan praktik syirik, dan dicap sebagai penganut animisme. Bagi mereka yang tertangkap, pilihannya sangat terbatas yakni menghadapi eksekusi atau dipaksa memeluk agama secara resmi dan hidup layaknya pria normal.(Said, 2017)

Dengan berkembangnya Islam sebagai agama mayoritas, keberadaan lima kategori gender serta peran Bissu tidak lagi dipandang wajar dalam masyarakat. Identitas seperti *calabai*, *calalai*, dan *bissu* mulai dianggap menyimpang dari kodrat manusia. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan arus modernisasi, tradisi masa lampau pun sering dinilai sebagai warisan kuno yang tidak relevan dan tidak layak untuk terus dipertahankan.

Negosiasi Identitas Gender dan Strategi Kebertahanan Bissu

Dalam tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, Bissu dikenal sebagai identitas gender yang melampaui batas kategori laki-laki dan perempuan. Keberadaannya berbeda dengan *calabai* (laki-laki yang mengekspresikan diri secara feminin) maupun *calalai* (perempuan yang berperilaku maskulin), karena Bissu dipandang sebagai sosok

yang berada di luar keduanya. Pada masa pra-Islam, Bissu menempati posisi sacral dengan tugas utama sebagai penghubung antara manusia, penguasa, dan dunia spiritual, sekaligus memimpin berbagai upacara adat dan ritus kosmologis seperti *mappalili* dan *toriolong*. (Suliyati, 2018)



Gambar 2: Ritual *mappalili* (ritual menyangkut musim tanam)
(Sumber: Burhanuddin Bella dalam liputannya melalui lionmag, 2022)

Namun, sejak masuknya Islam pada abad ke-16, peran tersebut mulai mengalami tekanan dan perubahan. Ajaran Islam yang menekankan norma patriarki dan heteronormatif menimbulkan penolakan terhadap kategori gender non-biner, sehingga Bissu terdorong untuk menegosiasikan identitasnya dengan cara menyesuaikan praktik adat pada nilai-nilai Islam. Penyesuaian ini tampak misalnya melalui penyematian unsur religius Islam dalam ritual atau pelaksanaan upacara secara lebih terbatas agar sesuai dengan norma masyarakat Muslim. Proses Islamisasi memang menimbulkan marginalisasi, tetapi tidak sepenuhnya menghapus eksistensi Bissu. Sebaliknya, mereka tetap mempertahankan warisan ritual dan kosmologi Bugis, meskipun makna dan fungsinya mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial yang baru.

Bissu juga memanfaatkan ruang budaya dan pariwisata sebagai strategi pelestarian, sehingga keberadaan mereka tidak hanya dipandang dari aspek religius, tetapi juga sebagai warisan budaya Bugis. Dalam menghadapi arus Islamisasi serta norma agama yang semakin menekankan pola gender biner, komunitas Bissu di Bugis menempuh strategi bertahan yang bersifat politik-kultural. Strategi ini diwujudkan melalui diplomasi budaya, keterlibatan dalam kebijakan publik, serta penyesuaian simbolik agar tetap memiliki ruang dalam ranah sosial maupun politik. Salah satu langkah penting adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah untuk memperoleh legitimasi atas adat dan tradisi sebagai bagian dari warisan budaya takbenda. Misalnya, di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Bissu mendapatkan dukungan pemerintah setempat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan pariwisata, seperti perayaan adat, pertunjukan seni tradisional, hingga pelestarian upacara ritual. (Rahayu, 2021)

Selain itu, komunitas Bissu menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merancang sekaligus memasarkan paket wisata budaya yang meliputi pertunjukan ritual, penampilan kesenian tradisional, hingga pameran adat. Melalui dukungan kebijakan pemerintah setempat, baik dalam bentuk pengakuan maupun upaya pelestarian, Bissu dapat berpartisipasi dalam festival kebudayaan dan menjadi bagian dari destinasi wisata

daerah, sehingga membuka peluang lebih luas untuk menjangkau pasar lokal maupun internasional.

Strategi lainnya adalah pada peran ekonomi Bissu di luar ritual. Aktivitas sebagai beauty salon, penyanyi, tokoh teater, dan artis budaya memberi alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi menurunnya permintaan ritual tradisional karena perubahan nilai dan keagamaan. Dengan demikian, ekonomi budaya menjadi instrumen penting dalam keberlanjutan komunitas Bissu, menjaga agar tradisi tidak hanya menjadi ingatan tetapi juga faktor produktif dalam ekonomi lokal. (Saleh et al., 2023)

Negosiasi identitas gender serta strategi keberlanjutan yang dijalankan komunitas Bissu menghasilkan berbagai implikasi baik sosial, budaya, agama, maupun politik. Pada tingkat lokal hingga nasional. Dari sisi sosial, upaya ini berkontribusi pada terbentuknya ruang toleransi dalam masyarakat Bugis, di mana keberadaan dan peran ritual Bissu tetap bisa dipertahankan meski berada di bawah tekanan norma keagamaan dan pandangan gender yang konservatif. Adaptasi terhadap simbol-simbol tradisional agar lebih selaras dengan ajaran agama membuat praktik adat tetap dapat berlangsung, sekaligus menjaga warisan budaya yang sarat sejarah dan nilai spiritual bagi masyarakat Bugis. Sementara itu, secara budaya, negosiasi ini berdampak pada pergeseran makna tradisi: sejumlah ritual yang sebelumnya dikategorikan sebagai pra-Islam atau bagian dari kepercayaan lama (*toriolong*) ditafsir ulang agar sesuai dengan praktik Islam yang dominan, sehingga unsur-unsur lama tetap bertahan, meskipun dengan penekanan yang lebih kontekstual dan melalui simbolisme yang dianggap lebih “aman” oleh masyarakat religius.

Dalam ranah keagamaan, implikasi negosiasi ini tampak pada adanya ketegangan antara otoritas religius dengan tradisi lokal. Identitas gender Bissu kerap menjadi isu perdebatan di kalangan ulama maupun tokoh agama terkait batas-batas keislaman, persoalan syirik, serta posisi tradisi dalam kerangka Islam Nusantara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan stigma terhadap komunitas Bissu, namun sekaligus membuka peluang lahirnya dialog serta penafsiran ulang ajaran Islam yang lebih inklusif terhadap keragaman budaya dan identitas gender.

Dalam ranah politik, hasil dari proses negosiasi berimplikasi pada kebijakan publik, pengakuan terhadap adat, serta pola hubungan antara komunitas adat dan pemerintah daerah. Apabila berjalan efektif, negosiasi ini dapat memberikan ruang bagi Bissu untuk memperoleh legitimasi formal, akses pada program pelestarian budaya, dukungan pariwisata, hingga perlindungan melalui regulasi dan hukum. Meski demikian, terdapat potensi terpinggirkannya Bissu jika upaya negosiasi dipandang terlalu kompromistis oleh komunitas itu sendiri, atau ketika pemerintah hanya memanfaatkan tradisi Bissu sebagai komoditas budaya tanpa memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak dan keaslian praktik mereka.

Dari sisi psikologis dan personal, dampak negosiasi ini cukup besar seperti identitas Bissu dapat terasa lebih “terlindungi” dalam konteks sosial dan religius apabila mereka mampu menemukan ruang ekspresi yang dianggap layak diterima. Namun, kondisi tersebut kerap disertai beban batin, seperti harus menyamarkan sebagian identitas,

menyesuaikan praktik ritual, atau munculnya perasaan kehilangan keaslian diri.

Makna Fenomena Bissu bagi Sejarah Peradaban Islam Nusantara

Dalam masyarakat Bugis sebelum kedatangan Islam, Bissu memiliki kedudukan historis yang sangat istimewa sebagai sosok sakral yang berada di luar batas kategori gender konvensional. Mereka dipandang suci karena diyakini mampu memadukan unsur maskulinitas dan femininitas, sehingga dianggap lebih dekat dengan kekuatan ilahi. Dalam tatanan sosial dan keagamaan, Bissu berfungsi sebagai pemimpin upacara, penjaga *pangngadereng* (adat, norma, serta sistem sosial), dan perantara spiritual yang menghubungkan manusia dengan dewa atau arwah leluhur. Kehadiran Bissu juga memiliki dimensi politik, sebab proses pengangkatan raja atau pemimpin senantiasa melibatkan mereka untuk memberikan legitimasi serta restu spiritual. Dengan demikian, posisi Bissu tidak hanya berhubungan dengan kepercayaan religius, tetapi juga erat kaitannya dengan kewibawaan sosial dan politik dalam kerajaan Bugis. Oleh karena itu, sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, Bissu dapat disebut sebagai pusat kehidupan spiritual sekaligus penjaga keseimbangan adat dan politik, yang menjadikan keberadaan mereka berperan penting dalam sejarah dan identitas budaya Bugis. (Azizah, 2022)

Ketika Islam mulai masuk ke Sulawesi Selatan, pertemuannya dengan tradisi Bissu melahirkan dinamika sosial dan keagamaan yang cukup rumit. Islam tidak serta-merta menyingkirkan peran Bissu, tetapi justru terjadi proses penyesuaian, akulturasi, dan transformasi. Tradisi lama tetap dipertahankan dalam wujud ritual dan adat, namun nilai-nilai Islam secara perlahan mengubah makna maupun tata cara pelaksanaannya. Misalnya, kisah-kisah leluhur seperti *toriolong* serta ritual agraris dan sakral seperti *mappalili* dan *maggiri* masih dilaksanakan, tetapi tafsir, fungsi, dan ruang lingkupnya mengalami pengaruh norma Islam.



Gambar 3: Tradisi *maggiri* (tarian kekebalan tubuh)
(Sumber: jpnn24.com, 2024)

Upacara yang sebelumnya ditujukan langsung kepada roh atau dewa, kemudian banyak dipahami kembali agar sesuai dengan ajaran syariat, bahkan dalam beberapa kasus dialihkan menjadi sekadar pertunjukan budaya. Kedudukan Bissu sendiri, yang dahulu memiliki otoritas spiritual dan politik yang kuat, dalam masyarakat Islam sebagian mulai mengalami penyusutan atau dipandang sebagai praktik yang tidak sejalan dengan keyakinan Islam yang lebih ketat. Meski demikian, sebagian masyarakat Bugis tetap memandang Bissu sebagai warisan budaya yang dapat berdampingan dengan Islam,

bukan sebagai praktik yang bertentangan. Dalam ranah kerajaan, proses Islamisasi membuat sejumlah peran religius Bissu digantikan oleh tokoh Islam seperti *Kadhi* atau imam, meskipun fungsi ritual-adat tetap melekat sebagai identitas budaya Bugis. Dengan demikian, perjumpaan tersebut melahirkan bentuk Islam yang khas di Nusantara, yakni Islam yang beradaptasi dengan tradisi lokal, di mana keberadaan Bissu menjadi bagian dari proses integrasi antara adat dan agama.(Nurfadillah, 2019)

Dari sudut pandang filosofis, Bissu mencerminkan keseimbangan dalam dualitas kehidupan seperti laki-laki dan perempuan, sakral dan duniawi, manusia dan transendensi ilahi. Bagi masyarakat Bugis pra-Islam, sosok Bissu dipandang sebagai perwujudan penyatuan unsur yang berbeda yang justru menghasilkan kesempurnaan spiritual. Pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan proses Islamisasi Nusantara, sebab Islam membawa ajaran tauhid yang menekankan prinsip keselarasan, kesatuan, serta keteraturan kosmos. Oleh karena itu, Bissu dapat dimaknai sebagai simbol peralihan dari keyakinan tradisional menuju Islam, di mana prinsip keseimbangan kosmik, keteraturan sosial, dan penghormatan terhadap leluhur tetap dipelihara meski struktur keagamaannya berubah.

Secara simbolis, Bissu juga berfungsi sebagai penghubung antara tradisi lama dan ajaran baru, menjadi mediator yang memungkinkan terjadinya integrasi antara adat Bugis dengan norma-norma Islam. Ritual yang mereka laksanakan, tidak hanya sebatas praktik budaya, tetapi juga menjadi wujud dialog simbolik antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam kerangka Islam Nusantara, simbolisme Bissu memperlihatkan bahwa praktik keberagaman di Indonesia berkembang melalui akulturasi, di mana Islam tidak meniadakan tradisi lokal, melainkan memberikan makna baru pada simbol-simbol tersebut sehingga lahir corak Islam yang khas, berakar pada budaya, namun tetap berpijak pada prinsip tauhid.

KESIMPULAN

Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan membawa perubahan besar terhadap kedudukan sosial Bissu, yang pada masa pra-Islam menempati posisi utama dalam struktur kerajaan serta kehidupan spiritual masyarakat Bugis. Sebagai tokoh sakral, Bissu berperan sebagai pemimpin upacara, penjaga *pangngadereng*, sekaligus perantara antara manusia, penguasa, dan kekuatan transendental. Islamisasi yang terjadi di Sulawesi Selatan membawa perubahan besar bagi Bissu yang semula berperan sentral dalam ritual, adat, dan kehidupan spiritual masyarakat Bugis pra-Islam. Sejak abad ke-17, otoritas mereka digantikan oleh ulama, sehingga kedudukan Bissu kian terpinggirkan. Pada masa pemberontakan DI/TII hingga Orde Baru, mereka bahkan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Di era modern, identitas non-biner seperti Bissu makin dianggap menyimpang, sementara modernisasi mempersempit ruang hidup mereka. Dengan demikian, Islamisasi tidak hanya mengubah sistem keagamaan, tetapi juga memarginalkan peran sosial dan spiritual Bissu dalam sejarah Bugis.

Eksistensi Bissu dalam masyarakat Bugis membuktikan bahwa identitas gender non-biner memiliki peran penting dalam aspek sosial, religius, dan kebudayaan.

Walaupun sejak masuknya Islam di Sulawesi Selatan posisi mereka mengalami tekanan dan marginalisasi, Bissu tetap mampu bertahan dengan melakukan negosiasi identitas, menyesuaikan ritual, serta berpartisipasi dalam sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga warisan spiritual serta kosmologi Bugis, tetapi juga menciptakan ruang toleransi dan dialog antara tradisi lokal dengan ajaran agama. Proses negosiasi tersebut berdampak luas, mulai dari memperkaya wacana inklusivitas Islam Nusantara, mendukung pelestarian budaya, hingga memberi kontribusi pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Bugis. Oleh karena itu, Bissu tidak sekadar menjadi simbol budaya, tetapi juga representasi nyata dari akulturasi agama dan tradisi yang membentuk karakter Islam di Nusantara.

Bissu dalam masyarakat Bugis pra-Islam memiliki kedudukan sakral di luar kategori gender biasa, berperan sebagai pemimpin ritual, penjaga *pangngadereng*, serta mediator spiritual dengan pengaruh religius dan politik yang besar. Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan kemudian mengubah posisi mereka, menggeser sebagian otoritasnya, dan mendorong adaptasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Walaupun peran keagamaan Bissu berkurang, mereka tetap bertahan dengan menafsirkan ulang ritual, menjadikannya bagian dari budaya, dan menyerap unsur-unsur Islam dalam praktik adat. Secara filosofis, Bissu melambangkan keseimbangan dualitas hidup dan dapat dipahami sebagai simbol peralihan dari tradisi lama ke Islam, sekaligus penghubung antara adat Bugis dan ajaran agama. Oleh karena itu, fenomena Bissu menunjukkan bahwa Islam Nusantara berkembang melalui proses akulturasi yang tidak menghapus tradisi, melainkan menyesuaikannya sehingga lahir corak Islam yang berciri budaya sekaligus berlandaskan tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2022). Agama dan Tradisi: Pergumulan Bissu Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. *Penelitian Keiselman*, 18(01), 63–72.
- Fatimah, A. F. H., Inayah, F., Suyudi, M., Hasbi, & Rasul. (2024). Tradisi Appabottingeng (Pesta Perkawinan) Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan: Perspektif Teori Perubahan Sosial Alvin Boskoff. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 08(02), 434–446.
- Jufri, H. D., Nuraeni S, Arif, M., Yani, A., & Habib Akramullah, A. (2023). Bissu sebagai Pemimpin Adat Pernikahan: Kajian Tentang Warisan Budaya Masyarakat di Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 11(02), 107–124. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v11i02.43988>
- M. Dahlan M. (2021). Proses Islamisasi Melalui Dakwah Di Sulawesi Selatan Dalam Tinjauan Sejarah. *Jurnal Rihlah*, 1, 141–148.
- Nurfadillah, N. (2019). Negosiasi Kepercayaan Toriolong Dengan Agama Islam Pada Bissu Dan Masyarakat Bugis Makassar. *Sosio-religius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1), 12–25. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosio-religius/article/view/10620>
- Rahayu, N. W. S. (2021). Eksistensi Pendeta Bugis (Bissu) Dalam Kebertahanan Tradisi Di Kecamatan Segeri. *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 12(3), 166–176. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v12i3.426>

- Rokhmansyah, A., Hanum, I. S., & Dahlan, D. (2018). Representasi Gender Dalam Novel Calabai. *CaLLs*, 4, 89–102.
- Said, M. (2017). Peran Bissu Pada Masyarakat Bugis. *Prosiding Seminar Nasional* 2, 69–78. <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2731>
- Saleh, M., Azis, S. A., Agama, I., & Negeri, I. (2023). Eksistensi Bissu dalam Masyarakat Suku Bugis Studi Kasus Bissu di Segeri Kabupaten Pangkep. *Jurnal Agama Dan Masyarakat Sosiologia*, 2(1), 25–39.
- Suliyati, T. (2018). Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 52. <https://doi.org/10.14710/endogami.2.1.52-61>